



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YAYUK NURUL AFIDAH
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 449276

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/50 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11B3C/SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.400.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 531.400.000

**III. HUTANG** Rp. 381.500.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 149.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : YAYUK NURUL AFIDAH  
NIK : 6171016605820004  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG  
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2019  
Tanggal Kirim : 27 Januari 2020

**Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:**

☒

Lengkap

☐

Tidak Lengkap



*\*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.